

Judul : Komisi V: utamakan keamanan kawasan
Tanggal : Sabtu, 29 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pulihkan Desa Wisata Sade Komisi V: Utamakan Keamanan Kawasan

ANGGOTA Komisi V DPR Abdul Hadi menyoroti musibah kebakaran yang melanda kawasan adat Desa Wisata Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa bencana itu perlu jadi momentum merumuskan perspektif baru mengenai keamanan bangunan kawasan permukiman tradisional yang rentan.

Hadi mengatakan, peristiwa ini memerlukan intervensi langsung dan penataan Pemerintah terhadap infrastruktur dasar di kawasan permukiman adat. Arsitektur bangunan tradisional Sade sebagai identitas budaya masyarakat Sasak harus tetap dipertahankan. Tapi, sistem keselamatan serta proteksinya perlu ditingkatkan.

Tata letak rumah tradisional yang berdempetan serta material alam membuat pencegahan kebakaran perlu jadi perhatian serius. Standardisasi keamanan jaringan kelistrikan dan air di kawasan cagar budaya merupakan keharusan. "Instalasi listrik wajib aman mencegah korsleting, serta Pemerintah menyediakan sarana hidran di titik strategis desa," jelasnya, Kamis (27/8/2026).

Dia bilang, Pemerintah sebenarnya telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur persyaratan keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran serta kelistrikan. Tapi, tantangannya adalah menerjemahkan standar itu ke dalam karakter kampung adat. Penerapan standar keselamatan jangan sampai membuat bangunan rumah adat

kehilangan identitas aslinya.

Desa Sade, lanjut Hadi, nantinya bisa dijadikan pilot project kampung adat aman kebakaran sebagai model bagi destinasi wisata tradisional lainnya di Indonesia. Standar keselamatan nasional tidak harus menyeragamkan bentuk seluruh kampung adat. Pemerintah cukup menetapkan standar keselamatan wajib, sedangkan desain teknologi disesuaikan karakter arsitektur daerah.

Langkah lanjut berikutnya, penerapan teknologi perlu menyesuaikan budaya lokal, dan tidak memaksa menyesuaikan teknologi. Jaringan listrik harus aman, sumber air tersedia, serta akses pemadam jelas tanpa mengorbankan rumah adat. Langkah itu tidak hanya menyelamatkan fisik bangunan, melainkan juga menjaga warisan budaya dan keselamatan masyarakat.

Dia menegaskan, proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana Desa Sade tidak boleh hanya dihebankan kepada Pemda maupun masyarakat adat setempat. Ikon pariwisata nasional itu memerlukan penanganan cepat, terintegrasi, serta melibatkan pemangku kepentingan. "Kolaborasi anggaran dan perancangan tata ruang diperlukan agar kebudayaannya dapat tetap lestari," ucap legislator asal Pulau Lombok itu.

Terpisah, anggota Komisi VIII DPR Matindas J Rumambi meminta Pemerintah mempercepat tahapan pengecekan dan verifikasi pascakebakaran. ■ PYB